

**STRATEGI ADAPTASI EKOLOGIS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PADA MASYARAKAT SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN
SALAK**

Oleh :

Rita Rahmawati, Ginung Pratidina*) dan Muarif)**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas

Djuanda Bogor*)

Dosen Fakultas Agribisnis dan Teknologi Pangan Universitas Djuanda Bogor)**

ABSTRACT

Long term goal of this study is to improve the welfare of people around Gunung Halimun Salak National Park forest which is located in Kabupaten Bogor and Lebak trough advocation of academic draft for poverty eradication policy for local government, the implementation of ecological adaption model, and new alternative income strategic. The study result in time hopefully could be published in national accredited journal. The specific target of the study is developing ecological adaption model and new income strategic which is pro to human welfare and natural conservation; and academic draft of policy strategy for poverty eradication.

Ecological adaption and new income strategic refers to the data of forest ecology social institution system wether original or adaption result with various knowledge exercises and government (institution) policy; how the exist institution could survive and also could guarantee the livelihood sustainable of the people, or vise versa. The necessary data is gathered from literature study and in-depth interview, focus group discussion and seminar. Actual data comes from household around the forest which is categorized based on royal customary society (masyarakat adat kasepuhan) and common people.

In the first year, designing ecological adaptation model and new income strategic which is tend to human welfare and natural conservation. Model that formulated in the first year will be implemented in the second year with action research method approach wich will be evaluated in the end of the year. Evaluation result will be formulated in academic draft of poversty eradication strategic policy which considering

local institution system and government, ecological adaption strategic, and income strategic of the society.

Key word : poverty eradication policy; ecological adapation model and new alternative income strategic

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hutan sebagai basis *livelihood* (nafkah) masyarakat lokal sudah berlangsung cukup lama. Hutan sebagai tempat pengembangan sistem pertanian yang memberikan hampir semua makanan di dunia telah terjadi selama berjuta tahun dan masih berlangsung sampai saat ini. Namun keberadaan mata pencaharian sebagai petani sudah mulai terancam, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Bellwood (2005) bahwa sifat pertanian saat ini berada di bawah tekanan terus-menerus sebagai reaksi lingkungan terhadap beban miliaran manusia lapar dan kutukan iklim yang tidak dapat diramalkan. Bellwood menyebutkan bahwa kita hidup melalui periode penting dalam sejarah manusia, mungkin suatu titik balik terhadap masa depan. periode kolosal teknologi, ekonomi, dan perubahan demografis.

Bellwood mencatat bahwa penyebaran dari populasi pertanian awal melalui daerah yang sebelumnya

diduduki oleh pemburu-pengumpul, dibuat banyak pola-pola dasar dalam distribusi bahasa, budaya, dan genotipe yang masih bertahan hingga sekarang di sebagian besar daerah beriklim tropis. Namun, tidak terjadi penyebaran dari semua daerah asal pertanian. Baik itu bahasa, budaya, dan genotipe selalu tersebar serempak sempurna. Keseluruhan masa lalu manusia telah benar-benar sangat kompleks.

Sejarah hutan sebagai basis *livelihood* manusia sudah digambarkan oleh Bellwood dalam penyebaran pola pertanian awal dan sejarah pertanian awal di dunia. Sepanjang sejarah menunjukkan bahwa strategi nafkah penduduk mempunyai pola-pola berbeda dipengaruhi oleh budaya dan perubahan social. Kenyataannya di lapangan, perubahan budaya dan social terjadi seiring dengan adanya modernisasi yaitu masuknya pengetahuan baru dan beradaptasi dengan pengetahuan yang sudah dianut masyarakat secara bertahun-tahun. Namun tidak sedikit perubahan terpaksa dilakukan untuk

merespon perubahan yang tidak diharapkan misalnya masuknya kebijakan pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan hutan yang tadinya bersifat open akses menjadi kawasan lindung atau taman nasional. Kasus seperti ini terjadi di hampir semua taman nasional di Indonesia, implikasinya adalah pada berkembangnya konflik diantara masyarakat dengan pemerintah. Namun lebih dari pada itu, konflik tersebut telah membuat moral ekonomi petani berubah. Sebagian melakukan perlawanan dengan menyandarkan hidup (nafkah) pada pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab (illegal logging) dan sebagian lagi secara rasional membuat pilihan nafkah lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi (kemiskinan) yang timbul akibat kebijakan pemerintah pusat.

Bagaimanapun, konflik yang terjadi antara taman nasional dan masyarakat telah menyebabkan guncangan yang cukup hebat bagi masyarakat dimana menyebabkan terjadinya perubahan, di satu sisi telah menyebabkan terjadinya deforestasi sementara di sisi lain telah menyebabkan meningkatnya kemiskinan, perubahan nafkah, perubahan kelembagaan, norma dan budaya hingga

tatanan kependudukan. Indikator perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan sistem pangan, sistem nafkah berubah, capital social berubah, pola persebaran penduduk berubah, migrasi desa kota meninggi dan sejumlah perubahan tatanan sosial lainnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Taman Nasional dalam rangka pelestarian hutan dengan mengadakan perluasan lahan taman nasional gunung halimun salak berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 berbenturan dengan kepentingan masyarakat, karena sejak SK itu terbit, hutan yang tadinya open akses menjadi tidak ada akses untuk masyarakat. Untuk itu, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah setiap masyarakat bereaksi sama terhadap berbagai perubahan kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan yang mengancam livelihood masyarakatnya dan menyebabkan meningkatnya kemiskinan masyarakat sekitar hutan
2. Bagaimana dengan masyarakat yang memiliki sistem livelihood

yang khas berbasis budaya local dan ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, strategi adaptasi ekologis seperti apa yang mereka jalankan.

II. METODE Riset

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada paradigma konstruktivisme (lihat, Denzin, 2000). Secara ontologis, konstruktivisme dibangun atas tiga proposisi utama. *Pertama*, struktur sebagai pembentuk perilaku aktor, baik individual maupun institusi, tidak hanya terdiri memiliki aspek material, tetapi juga normatif dan ideasional. *Kedua*, kepentingan (sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku) bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku, yang telah dimiliki oleh aktor-aktor, melainkan sebagai produk dari identitas aktor-aktor tersebut. *Ketiga* struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis yakni menekankan peran struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan serta pada saat yang bersamaan, menekankan peran praktek dalam membentuk struktur-struktur tersebut.

Metode penelitian ini menggu-

nakan pendekatan kualitatif dimana pemaknaan atas temuan atau fakta dikonstruksi berdasarkan perspektif subyektif dari tinjauan. Pemaknaan pada penggambaran, pemahaman dan menjelaskan fenomena yang kompleks pada hubungan, pola-pola dan konfigurasi antar factor dengan menggunakan analisis kesejarahan. Dalam perspektif ini, penyelidikan dan pembuktian terhadap gejala sosial dilakukan lebih banyak secara konstruktif dimana pendekatan reflektif, antar subyek, dan perenungan makna menjadi sangat penting posisinya dalam mendapatkan makna kebenaran atas suatu fakta. Sekalipun demikian, studi ini juga memberikan tempat yang cukup leluasa pada upaya-upaya menginvestigasi penyebab dan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari keputusan politik ekonomi yang diambil oleh otoritas kekuasaan di kawasan studi.

III. HASIL PENELITIAN

3.1. TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK TERKINI

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (2010), Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang selanjutnya disebut sebagai TNGHS

merupakan taman nasional darat yang terletak di dua Propinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten dan 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak. Jumlah desa yang berada di dalam kawasan adalah 114 desa dan 26 kecamatan.

Berdasarkan Mepmenhut 175/Kpts-II/2003 luas total TNGHS adalah ± 113.357 ha, akan tetapi lampiran peta pada surat tersebut kurang sesuai dengan kondisi dan batas kawasan yang ada di lapangan. Saat ini proses rekonstruksi tata batas masih dilakukan oleh BPKH XI Jogjakarta.

Alih fungsi kawasan hutan lindung, hutan Produksi dan hutan produksi terbatas yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, tanggal 10 Juni 2003 tentang penunjukkan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas ± 113.357 hektar. Perluasan ini menyebabkan terdapat sekitar 314 kampung dengan 99.782 jiwa berada di dalam kawasan dan sekitar kawasan TNGHS. Telah di terapkan pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani sebelum

penunjukan kawasan TN yang memberikan akses pemanfaatan kawasan kepada masyarakat. Selain itu, adanya penambangan emas masuk dalam wilayah awasan taman nasional, hal ini disebabkan telah terdapat ijin pertambangan (emas dan panas bumi) sebelum penunjukan kawasan dan pembangunan fasilitas vital negar (SUTET) di dalam kawasan TNGHS.

Luas hutan alam di TNGHS pada tahun 1989-2004 secara gradual menurun, sedangkan hutan tanaman relatif stabil dengan fluktuasi naik dan turun tidak signifikan Selama periode 1998-2001, hutan alam berkurang 25 %, atau berkurang sebesar 22 ribu hektar. Penurunan ini diikuti dengan kenaikan semak belukar, ladang dan lahan terbangun. Bila diteliti berdasarkan periode perubahan, maka proses kehilangan hutan alam banyak terjadi pada periode tahun 2001 sampai dengan 2003. Kemungkinan peristiwa ini berkaitan dengan proses implementasi otonomi daerah, dimana pada saat itu terjadi ketidaktentuan hukum (Prasetyo L.B, dkk 2006).

Pada tahun 2004-2007 terjadi penurunan tutupan hutan sebesar 2163,65 ha dan penurunan tutupan semak yang cukup besar yaitu dari

16.386 ha menjadi 7.875,27 ha atau sebesar 8.510,73 ha. Penurunan tutupan hutan dan semak ini diikuti oleh kenaikan pada tutupan kebun campuran seluas 4275,83 ha, tutupan ladang sebesar 2.293 ha, tutupan lahan kosong sebesar 2737 ha dan tutupan lahan terbangun seluas 1970 ha.

Selama periode tahun 2007-2008, luas hutan alam di kawasan TNGHS hanya sedikit mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,06% atau berkurang sebesar 136,44 hektar. Namun terjadi kenaikan yang signifikan untuk luas kebun teh sebesar 1,4%. Kenaikan ini diikuti dengan penurunan luas kebun campuran sebesar 1,5% dan lahan kosong sebesar 1,32%. Selain itu, luas lahan terbangun juga mengalami kenaikan sebesar 0,41%.

3.2.KARAKTERISTIK MASYARAKAT LOKAL

Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup di lingkungan dan di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak baik yang termasuk masyarakat adat Kasepuhan maupun non adat kasepuhan. Rata-rata masyarakat yang tinggal di Kawasan Gunung Halimun merupakan masyarakat miskin. Karakteristik ini terlihat

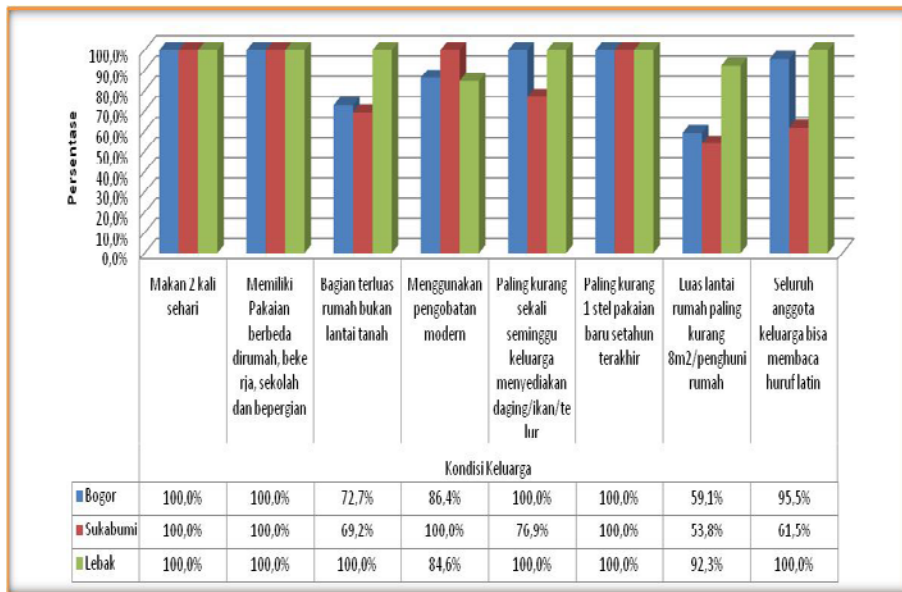
dari sebagian besar rumah yang terbuat dari bilik dan berlantai tanah. Sekalipun demikian, melihat dari beberapa kondisi kelurga seperti kebiasaan makan, ketersediaan pakaian, pendidikan anak, masyarakat di kawasan ini telah memiliki kondisi yang baik, yaitu makan minimal 2 kali sehari dan tercukupi pakaian serta anak-anak dapat bersekolah. Hal ini menggambarkan masyarakat yang aktif dan produktif. Tingkat Aktifitas masyarakat dibuktikan dengan lebih dari 90% responden ikut aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Kondisi yang dinilai kurang dan dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di tiga lokasi penelitian adalah tabungan keluarga dan rekreasi. Tabungan keluarga hanya dimiliki oleh 38,5-46,2% responden dan rekreasi yang hanya dilakukan oleh sekitar 27,3-30,8% responden.

Duapuluh dua kriteria kondisi keluarga yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan kondisi yang relatif sama pada tiga wilayah lokasi studi. Hasil uji statistik (ANOVA) kondisi keluarga di tiga wilayah studi menunjukkan tidak berbeda nyata. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan bahwa

seluruh responden menyatakan bahwa mereka makan minimal 2 kali sehari. Dari indikator ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kelaparan di wilayah ini, baik daerah Lebak, Bogor maupun Sukabumi. Mereka mendapat kecukupan makan (nasi) hanya persoalannya apakah gizinya mencukupi atau tidak. Bila dilihat dari indikator paling tidak seminggu sekali keluarga menyediakan daging, maka hasilnya menunjukkan bahwa masih ada 23,1% responden wilayah Sukabumi yang tidak dapat memenuhi kecukupan daging dalam seminggu.

Indikator yang kedua dilihat dari kepemilikan pakaian. Hasilnya

menunjukkan bahwa mereka mempunyai pakaian lebih dari tiga buah, artinya pakaian untuk bekerja berbeda dengan pakaian untuk di rumah atau untuk bepergian, baik pada orang tua maupun pada anak. Dari indikator ini mereka memiliki kecukupan pakaian, artinya tidak ada yang miskin. Termasuk dalam hal membeli pakaian, semua responden menyatakan paling tidak setahun sekali mereka membeli pakaian, khususnya pada saat lebaran. Namun beberapa responden menyatakan bukan hanya pada saat lebaran, bahkan kalau ada uang lebih mereka dapat membeli baju sebulan sekali.



Gambar 1. Gambaran Responden Berdasarkan Kondisi Keluarga.

Indikator yang ketiga dilihat dari lantai terluas rumah bukan dari tanah. Hasilnya menunjukkan bahwa di daerah Lebak, semua penduduk memiliki rumah yang lantainya tidak dari tanah. Artinya penduduk di daerah ini dari indikator ini dinyatakan tidak miskin. Tetapi di daerah Bogor, 27,3% rumahnya masih berlantai tanah. Di daerah Sukabumi 40,8% masih menunjukkan bahwa lantai rumah dari tanah. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari indikator ini, masih ada masyarakat miskin di daerah tersebut. Indikator ini berkorelasi dengan luas rumah minimal 8 meter persegi per penghuni rumah. Artinya jika ada 3 orang penghuni, maka minimal luas rumahnya 24 meter persegi. Hasilnya menunjukkan bahwa di wilayah Bogor,

masih ada 41,9% yang memiliki luas rumah kurang dari 8 meter persegi per kepala. Sementara di daerah Sukabumi, masih ada 46,2% yang luas rumahnya kurang dari 8 meter persegi per kepala. Di daerah Lebak masih ada 7,7% responden yang memiliki luas rumah kurang dari 8 meter persegi.

Berdasarkan indikator pengobatan modern, masih ada sebanyak 23,6% responden wilayah Bogor yang sepenuhnya mempercayakan pengobatan kepada paramedic tradisional (bukan modern), dan sebanyak 25,4% responden wilayah Lebak masih menggunakan pengobatan tradisional. Dari indikator ini, menunjukkan masih ada kemiskinan kesehatan di daerah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Kemiskinan di Tiga Daerah

	Bogor	Sukabumi	Lebak
Kecukupan Makan	Cukup	Cukup	Cukup
Kecukupan Gizi		Kurang	
Kecukupan Pakaian	Cukup	Cukup	Cukup
Kelayakan Rumah	Kurang	Kurang	Cukup
Indikator Kesehatan	Kurang	Cukup	Kurang
Indikator Pendidikan	Hampir Cukup	Kurang	Cukup
Kesimpulan	2 indikator kurang	3 indikator kurang	1 indikator kurang

Dilihat dari indikator bisa membaca hurup latin, maka di wilayah Lebak semua responden bisa membaca dan menulis huruf latin, namun di wilayah Bogor masih ada 4,5% tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, sedangkan di wilayah Sukabumi sebanyak 48,5% responden tidak bisa menulis dan membaca huruf latin. Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan dari factor pendidikan di kedua daerah tersebut. Dari berbagai indikator kemiskinan yang ditunjukkan/ diwakili oleh kondisi keluarga responden menunjukkan bahwa masih ada kemiskinan di ketiga daerah tersebut.

3.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADAPTASI DAN STRATEGI NAFKAH MASYARAKAT

Kebijakan pemerintah, konflik, bencana alam, kepadatan penduduk, kerusakan hutan, musim, teknologi, kepemilikan sumberdaya alam, kemampuan/kesempatan ekonomi dan gaya hidup (kebudayaan) merupakan faktor-faktor yang secara umum biasa mempengaruhi pendapatan masyarakat. Apabila seluruh faktor tersebut bersifat positif maka usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat berjalan baik dan

tingkat pendapatan masyarakat juga akan baik.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah perluasan taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 Tentang Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun Dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas 113.357 Hektar Di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Pada umumnya masyarakat sekitar kawasan TNGHS sudah mengetahui kebijakan pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan konservasi. Penetapan sebagai kawasan konservasi bagi masyarakat berarti mereka tidak boleh menebang pohon, berburu dan bercocok tanam di kawasan tersebut.

Tapi sejak tahun 2003, Pemerintah membentuk lembaga baru untuk mengubah hutan produksi menjadi taman nasional. Sejak tahun 2003, masyarakat Kasepuhan dilarang untuk menggunakan tanah ini. Jadi, konflik menjadi tak terhindarkan.

Secara umum tanggapan masya-

rakat terhadap kebijakan pemerintah ini cukup beragam. Sebagian besar masyarakat menerima dan menyatakan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga tetap dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Pernyataan ini banyak diperoleh oleh masyarakat di ketiga lokasi. Di Kabupaten Bogor, tanggapan ini wajar karena mereka tinggal di kawasan enclafe TNGHS yang secara hukum diijinkan untuk melakukan aktivitas bertani, termasuk bekerja di perkebunan teh. Demikian juga masyarakat di Kabupaten Lebak yang juga termasuk kawasan enclafe TNGHS. Masyarakat di kabupaten Lebak menyatakan bercocok tanam di sawah atau ladang milik mereka tidak dilarang oleh pemerintah, yang dilarang adalah menambang emas, menebang pohon dan berburu.

Bagi masyarakat sekitar TNGHS yang berada di kabupaten Sukabumi kebijakan ini memberikan arti yang berbeda. Masyarakat di wilayah ini tinggal di dalam kawasan TNGHS akan tetapi bukan enclafe, sehingga secara hukum keberadaannya bermasalah. Karakteristik masyarakat di daerah ini yang kental dengan nuansa adat kasepuhan juga menjadikan

masyarakat ini terbiasa membutuhkan hutan sebagai sumber kayu bakar, mengingat adat mengharuskan memasak dengan kayu. Masyarakat juga membutuhkan kawasan TNGHS untuk bercocok tanam di ladang dan mengambil kayu di hutan untuk untuk bangunan.

Untuk itu tanggapan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi cenderung berkeberatan akan tetapi mereka menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 8% responden didaerah ini menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini, 8 % berpendapat konservatif dengan menyatakan menyerahkan keputusan kepada ketua adat atau yang biasa dipanggil Abah. Responden lain sebanyak 8% mengikuti kebijakan dengan berpindah bercocok tanam di lahan lain, dan 46 % berhenti mengambil kayu di hutan dengan mengandalkan kayu dari kebun yang dimiliki. Dengan demikian ada sekitar 38% responden tidak memberikan jawaban apapun yang dapat berarti mereka tidak tahu harus bagaimana.

3.4.KONFLIK

Menurut Dharmawan (2007) bahwa fenomena konflik sumber daya

alam (*natural resources conflict*) adalah isu ekologi yang secara instrumental menjadi “lahan garapan” ekologi manusia yang sulit di gantikan oleh bidang ilmu lainnya (lihat Buckles, 1999).

Pada kajian konflik sumberdaya alam, dilibatkan analisis etik normatif dimana ekologi manusia telah terbiasa secara instrumental untuk memahaminya. Terdapat banyak agenda lain yang masih dan sedang diselesaikan oleh para scholars ekologi manusia pada saat ini seperti persoalan ethnics - survival hingga cultural - survival (studi tentang “daya tahan hidup” sistem pengetahuan lokal, sistem budaya dan kearifan lokal melawan hampasan dan kooptasi ilmu - pengetahuan dan sistem budaya modern yang dikembangkan dari paradigma eksploitatif kapitalistik terhadap alam). Juga, persoalan mentransformasi pikiran ke arah ecosocial rationality dari rasionalisme natural utilitarianisme yang membelenggu cara - berpikir sebagian besar masyarakat modern yang sangat destruktif terhadap alam adalah garapan ekologi manusia kontemporer (Little, 2000).

Dharmawan (2007) mengemukakan bahwa dalam memahami mekanisme-mekanisme surviwal suatu komunitas pemikiran evolusionisme Darwinian telah mengantarkan ekologi manusia pada tataran perhatian yang intensif pada mekanisme *perekayasaan teknologi* dan *infrastruktur organisasi sosial*. Dua pilarmekanisme adaptasi yang terpenting tersebut yang kemudian mengisidimensi *cultural* (alam-pikiran atau carapandang manusia tentang alam) dalam sistem ekologi manusia. Investigasi teoritis terus berlanjut dan menyentuh kepada persoalan-persoalan konsekuensi logik pertautan dan per singgungan intensif dimensi “*culture*” dan “*nature*” pada sebuah sistem ekologi. Pada titik inilah investigasi teoritik diarahkan pada pencarian jawaban tentang “*social roots of ecological change*” atau “*ideational factors affecting the nature*” (lihat misalnya analisis Brosius, 1999). Pemikiran untuk mencari penyelesaian pragmatis persoalan-persoalan kritikal hasil interaksi “*culture*” and “*nature*”, di “wilayah politik” telah mengantarkan sejumlah pemikir ekologi.

Konflik sosial terjadi pada masyarakat di kawasan Gunung Halimun, baik di Kabupaten Bogor,

Kabupaten Sukabumi, maupun Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Bogor konflik terjadi antara masyarakat dengan TNGHS, dan anatara masyarakat dengan perkebunan, di kabupaten Sukabumi konflik terjadi antara masyarakat dengan TNGHS, dan di kabupaten Lebak konflik terjadi antara masyarakat dengan Jagawana.

Konflik antara masyarakat dengan TNGHS dan jagawana disebabkan oleh illegal logging dan pertambangan emas tanpa ijin. Konflik masalah illegal logging terjadi di ketiga kabupaten, sedangkan konflik pertambangan emas tanpa ijin hanya terjadi di Kabupaten Lebak. Konflik masyarakat dengan perkebunan terjadi di kabupaten Bogor. Konflik ini disebabkan sengketa penggunaan lahan. Strategi adaptasi masyarakat terhadap konflik tersebut antara lain dengan beralih profesi menjadi pedagang warung, montir bengkel, tukang ojek dan bekerja menjadi kuli pertambangan. Konflik pada masyarakat kasepuhan dipengaruhi/ factor utamanya karena masalah hutan, dimana hutan yang secara legal merupakan milik Negara dalam bentuk taman nasional juga diakui sebagai milik adat masyarakat Kasepuhan. Masyarakat

Kasepuhan mengaku bahwa mereka memiliki hutan. Mengatur hutan ini didasarkan pada pengetahuan lokal tentang zonasi, yaitu zona inti, zona hutan, zona cadangan dan zona pemanfaatan. Mereka memiliki aturan yang memungkinkan atau larangan untuk melakukan di kawasan hutan.

Namun, pemerintah juga mengakui bahwa hutan ini adalah hutan negara, sebelum tahun 2003 hutan ini terdiri dari hutan produksi dan taman nasional. Hutan produksi yang terletak di zona pemanfaatan hutan masyarakat kasepuhan. Masyarakat Kasepuhan dan perusahaan pemerintah memanfaatkan daerah ini bersama-sama. Perusahaan Pemerintah menanam kayu tanaman, sedangkan masyarakat kasepuhan menggunakan daerah ini sebagai tanah pertanian. Namun setelah tahun 2003, semua hutan ini menjadi taman nasional. Tidak ada lagi hutan produksi. Oleh karena itu tidak ada lagi pengelolaan hutan ini sebagai garapan masyarakat. Taman Nasional sendiri memiliki konsep zonasi untuk hutan. Lebih jelasnya lihat gambar. Berubahnya Taman Nasional yang berdampak pada hilangnya hak masyarakat atas hutan menyebabkan konflik antara masyarakat local (kasepuhan) dengan pemerintah

dalam hal ini Taman Nasional. Konflik tersebut berdampak pada kehidupan komunitas maupun pada individu dari masyarakat Kasepuhan. Dampak konflik ada yang bersifat positif ada yang bersifat negative.

3.5. ADAPTASI EKOLOGIS DAN STRATEGI NAFKAH

Pada dasarnya sekalipun kondisi ekologis dan kebijakan di sekitar berubah, namun tidak terlalu banyak mempengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitar hutan, terutama di wilayah Lebak dan Bogor. Penduduk di daerah Lebak yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki tanah di luar kawasan Taman Nasional, namun beberapa dari penduduk juga memiliki mata pencaharian lain di dalam kawasan, khususnya di daerah penambangan emas tanpa ijin. Sekalipun wilayah ini sudah ditutup oleh Taman Nasional, namun Taman Nasional tidak cukup kuat untuk menjaga wilayah ini, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa mengambil pasir emas, membawanya ke desa mereka, dan diprosen (pencucian) di halaman rumah masing-masing. Tanpa rasa takut masyarakat meletakkan pasir yang diduga berisi emas tertumpuk di jalan atau di depan rumah penduduk

masing-masing.

Begitupun dengan wilayah Bogor, mata pencaharian mereka sepenuhnya tertumpu pada perkebunan sebagai tukang petik teh, mandor perkebunan atau penyabit rumput di perkebunan atau pembasmi hama. Beberapa wanita yang tidak ikut bekerja di perkebunan bekerja di rumah membuka warung atau menjadi baby sitter menjaga anak-anak di tempat penitipan anak. Di daerah ini tidak terlalu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan menggarap lahannya sendiri. Ada masyarakat yang mencoba menggarap lahan di kawasan Taman Nasional, sejauh ini masih dibolehkan oleh Taman Nasional selama tidak ada bukaan baru.

Di daerah Sukabumi, masyarakat yang hidup disini adalah masyarakat adat kasepuhan yang memiliki sejarah keterkaitan dengan hutan secara historis. Masyarakat ini memiliki mata pencaharian utama sebagai petani padi. Umumnya masyarakat memiliki lahan di wilayah taman nasional yang dulunya wilayah Perhutani. Ketika perubahan status dari perhutani menjadi taman nasional di tahun 2003. Beberapa masyarakat kehilangan hak aksesnya untuk

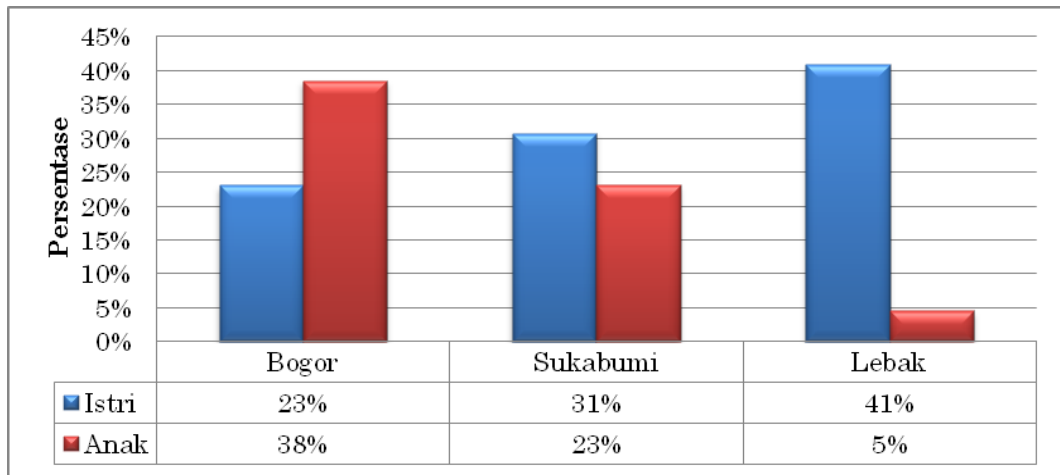
menggarap tanah. Namun beberapa masih tetap bertahan menggarap di lokasi taman nasional. Sejauh inipun Taman Nasional masih membolehkan asal tidak menebang pohon kayu (keras) dan tidak membuka lahan baru. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah ini adalah dengan menanam tanaman selain padi yang komersial bisa dijual seperti Kapolaga atau palawija, serta memberdayakan anggota keluarga seperti istri dan anak untuk turut bekerja mencari nafkah/ menghasilkan pendapatan.

Hasil analisis pendapatan dalam penelitian ini meliputi pendapatan kepala keluarga, pendapatan ibu rumah tangga, pendapatan anggota keluarga dan pendapatan total keluarga. Pendapatan total keluarga masyarakat sekitar TNGH berkisar antara Rp 480.000,- sampai Rp 5.000.000,-. Pendapatan terkecil terdapat di kabupaten Bogor dan pendapatan terbesar di Kabupaten Sukabumi.

Dukungan IRT dan anggota keluarga sangat bernilai bagi keluarga di kawasan ini, khususnya bagi keluarga miskin. Persentase istri yang turut mendukung ekonomi keluarga berkisar antara 23-41%. Sedangkan dukungan anggota keluarga berkisar antara 5-38%.

Pada prinsipnya sebagian besar pendapatan keluarga masih dihasilkan oleh kepala keluarga. Hal ini mengindikasikan peran kepala keluarga yang sangat penting dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Dengan demikian salah satu upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan ibu-ibu melalui pengembangan usaha berbasis keluarga.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anak dan istri turut mendukung ekonomi keluarga. Di wilayah Bogor, anak-anak yang bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk kepentingan keluarga/ rumah tangga cukup besar sebanyak 38%, jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini beragam, terutama di lingkungan perkebunan teh, turut mendukung pekerjaan orang tua sebagai pemetik teh. sementara di daerah lebak jumlah istri yang bekerja cukup banyak untuk mendukung ekonomi rumah tangga, sebanyak 41%, pekerjaan yang dilakukan umumnya di sector pertanian sebagai buruh tani.



Gambar 2. Pengembangan Usaha Berbasis Keluarga

3.6. MODEL ADAPTASI EKOLOGIS MASYARAKAT DISEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK

Model adaptasi ekologis yang berpihak pada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam adalah model adaptasi masyarakat local yang tetap bertahan hidup dalam kesejahteraan (keluar dari kemiskinan) sekalipun ditimpa berbagai masalah ekologis baik yang bersumber dari alam (seperti bencana alam) infiltrasi teknologi dan pengetahuan modern maupun perubahan kelembagaan akibat berubahnya status hutan dari hutan produksi menjadi

taman nasional yang menyebabkan hak akses masyarakat hilang dan masyarakat berada dalam kondisi konflik. Kondisi-kondisi tersebut jelas mempengaruhi mata pencaharian masyarakat (strategi nafkah masyarakat) yang menyebabkan mereka harus mencari strategi nafkah baru. Ada kalanya nafkah baru tersebut menempatkan masyarakat dalam kondisi sulit (miskin), namun karena adanya dukungan kelembagaan dan dukungan social (social capital bisa berupa konsep ketahanan pangan masyarakat) menyebabkan satu sama lain saling mendukung dan keluar dari kondisi sulit.



Gambar 3. Model adaptasi ekologis dan strategi nafkah baru yang berpihak kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam

Namun demikian kondisi tersebut belum cukup untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat maupun kelestarian alam/ hutan. Diperlukan berbagai prasyarat kondisi yang harus dicapai untuk mendukung

adaptasi ekologis masyarakat, yaitu berupa keputusan eko politik yang berpihak pada alam dan masyarakat, adanya pengelolaan kolaboratif antara taman nasional dan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai

partner dan campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan jalan keluar dari kemiskinan berupa program-program pengentasan kemiskinan yang terpadu dengan program pelestarian lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Dalam studi mengenai strategi adaptasi ekologis dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salakini diarahkan pada focus penelitian yang merupakan gabungan dari pendekatan social dan ekologi. Namun pada tahap awal untuk melihat pengaruh ekologi terhadap masyarakat, pendekatan ekonomi menjadi perhatian utama, terutama menyangkut dampak perubahan ekologi pada mata pencaharian masyarakat dan tingkat kehidupannya.

Hasil analisis menunjukan bahwa kondisi masyarakat di tiga wilayah masih menunjukkan kondisi kemiskinan baik diukur dari indikator ekonomi, social, kesehatan, pendidikan dan politik. Namun demikian untuk bertahan hidup dengan kondisi lingkungan yang berubah, masyarakat di tiga wilayah menunjukkan adanya strategi nafkah baru baik yang asli

maupun hasil adaptasi. Selain itu, ada factor lain yang berupa dukungan social dan dukungan kelembagaan yang mendorong masyarakat untuk tetap bertahan dalam kondisi konflik dengan taman nasional dan berbagai kesulitan hidup.

Model strategi adaptasi ekologis diartikans sebagai “kemajuan yang mantap, dan terus menerus dalam kondisi kehidupan yang mengandung unsure-unsur kebebasan, kebahagiaan dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat”. Unsur yang bebas tersebut mencakup komponen, sebagai berikut: Mutu kehidupan fisik; mata pencaharian; individualitas dan kebebasan memilih; pengembangan diri; dan perkembangan sosial politik.

Unsur-unsur di atas akan menciptakan model Adaptasi ekologis dan strategi nafkah baru yang mengacu kepada data tentang System kelembagaan sosio ekologi hutan baik yang asli maupun hasil adaptasi dengan berbagai benturan pengetahuan dan kebijakan (institusi) pemerintah, bagaimana kelembagaan yang ada tersebut bertahan dan menjamin kelangsungan livelihood masyarakatnya.

Namun untuk mencapai model adaptasi ekologis dan strategi nafkah

baru yang berpihak kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam tersebut membutuhkan berbagai prasyarat, yaitu terkondisikannya pengambilan keputusan eko politik yang berpihak pada alam dan masyarakat, adanya pengelolaan kolaboratif antara taman nasional dan masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai partner dan campur tangan pemerintah daerah untuk memberikan jalan keluar dari kemiskinan berupa program-program pengentasan kemiskinan yang terpadu dengan program pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellwood, Peter, 2005. *First Farmers: The origins of agricultural societies*. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing
- Brosius, JP, 1999. Green Dots, Pinks Hearts: Displacing Politics from Malaysian Rain Forest. *American Anthropologist* 101 (1): 36-57.
- Buckles, Daniel, 1999. Cultivating peace: conflict and collaboration in natural resource management By, International Development Research Centre (Canada), World Bank Institute. IDRC-CRDI.
- Dharmawan, A. H. 2007. *Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik*. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* Vol. 1/1.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2000. *Handbook of qualitative research*. USA: Sage Publications.
- Little, P. D., 1994. The link between local participation and improved conservation: A review of issues and experiences. In Western, D., and Wright, R. M. (eds.), *Natural connections. Perspectives in community-based conservation*. *Island*, Washington, pp. 347-372.